

Lessons from Xi Jinping's Strategic Leadership in Supporting Maritime Policy in the South China Sea

Mayang Agustin^{1*}, Asep Iwa Soemantri², Lukman Yudho Prakoso³, Panji Suwarno⁴, Dimas Gading Arya Pradana⁵, Elyakim Snekubu⁶, Ismaya Kenza Chalitz⁷, Ivan Fillbert Toelihere⁸

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

Corresponding Author: Mayang Agustin mayangagustin6@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Maritime Policy, Strategic Leadership, South China Sea

Received : 01 August

Revised : 24 August

Accepted: 28 September

©2024 Agustin, Seomantri, Prakoso, Suwarno, Pradana, Snekubu, Chalitz, Toelihere: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study analyzes Xi Jinping's maritime policy in the South China Sea with a focus on military power, economic diplomacy, and international law. Xi Jinping uses a militarization strategy through the construction of artificial islands and military infrastructure to strengthen China's territorial claims. In addition, the Belt and Road initiative expands maritime influence through economic cooperation, creating strategic dependencies. This study uses a literature review to compare Xi's maritime policy with previous approaches, and examines its impact on regional tensions, especially with ASEAN countries that have similar claims.

Pelajaran dari Kepemimpinan Strategis Xi Jinping dalam Mendukung Kebijakan Maritim di Laut China Selatan

Mayang Agustin^{1*}, Asep Iwa Soemantri², Lukman Yudho Prakoso³, Panji Suwarno⁴, Dimas Gading Arya Pradana⁵, Elyakim Snekubu⁶, Ismaya Kenza Chalitz⁷, Ivan Fillbert Toelihere⁸

Fakultas Keamanan Nasional, Unhan RI

Corresponding Author: Mayang Agustin mayangagustin6@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan Maritim, Kepemimpinan Strategis, Laut Cina Selatan

Received : 01 Agustus

Revised : 24 Agustus

Accepted: 28 September

©2024 Agustin, Seomantri, Prakoso, Suwarno, Pradana, Snekubu, Chalitz, Toelihere: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan maritim Xi Jinping di Laut China Selatan dengan fokus pada kekuatan militer, diplomasi ekonomi, dan hukum internasional. Xi Jinping menggunakan strategi militerisasi melalui pembangunan pulau buatan dan infrastruktur militer untuk memperkuat klaim teritorial Tiongkok. Selain itu, inisiatif Belt and Road memperluas pengaruh maritim melalui kerja sama ekonomi, menciptakan ketergantungan strategis. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk membandingkan kebijakan maritim Xi dengan pendekatan sebelumnya, serta meneliti dampaknya terhadap ketegangan regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim serupa.

PENDAHULUAN

Kebijakan maritim yang ideal seharusnya bertumpu pada pengelolaan laut yang berkelanjutan, perlindungan kedaulatan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dalam kondisi ideal, kebijakan ini tidak hanya memastikan keamanan maritim dan keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur maritim dan transportasi laut yang efisien (Smith, 2021). Pengelolaan laut yang berkelanjutan juga mencakup perlindungan lingkungan maritim dari ancaman seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan. Selain itu, negara-negara maritim perlu bekerja sama secara multilateral untuk menjaga stabilitas di perairan internasional dan menyelesaikan sengketa secara damai, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Laut China Selatan (Jones, 2020).

Namun, kondisi saat ini masih jauh dari ideal. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan maritim akibat kejahatan lintas negara, seperti perompakan dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dan polusi laut terus meningkat, yang mengancam keseimbangan ekosistem laut global (Roberts, 2019). Konflik teritorial di wilayah-wilayah seperti Laut China Selatan juga menambah kompleksitas dalam upaya menjaga keamanan maritim yang stabil dan damai. Upaya untuk menerapkan kebijakan berbasis hukum internasional, seperti UNCLOS, sering kali diabaikan oleh beberapa negara yang mengedepankan kepentingan nasionalnya sendiri.

Xi Jinping adalah Presiden Republik Rakyat Tiongkok sejak 2013 dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak 2012. Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, yang memberinya kendali atas angkatan bersenjata Tiongkok. Xi adalah putra dari Xi Zhongxun, seorang veteran revolusi komunis Tiongkok. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat kekuasaan partai serta membatasi oposisi politik. Xi Jinping memperkenalkan kebijakan "Chinese Dream" yang bertujuan mewujudkan kebangkitan besar bangsa Tiongkok melalui modernisasi ekonomi dan militer (Lam, 2015). Xi juga dikenal karena kampanye anti-korupsi yang meluas, yang diklaim menargetkan pejabat tinggi partai dan militer. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok semakin tegas dalam urusan internasional, terutama di Laut China Selatan, serta memperkenalkan inisiatif global seperti Belt and Road Initiative (Shambaugh, 2020).

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana Xi Jinping dalam perannya pada kebijakan Maritim terkait Laut Cina Selatan. Untuk dapat menjadi pelajaran bagi setiap wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan maritim.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan strategis Xi Jinping dalam mempromosikan kebijakan maritim di Laut China Selatan menunjukkan pendekatan yang tegas dan visioner. Xi Jinping menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan kebijakan ekonomi dalam memperluas pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Menurut Lam (2015), Xi memperkuat militerisasi di Laut China Selatan melalui pembangunan pulau buatan dan infrastruktur militer, yang menegaskan klaim

teritorial Tiongkok. Selain itu, melalui diplomasi bilateral dan inisiatif Belt and Road Initiative, Xi memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan ketergantungan dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan maritim Tiongkok (Shambaugh, 2020). Kepemimpinan Xi mencerminkan perpaduan antara kekuatan keras dan lunak dalam menjaga kepentingan strategis di wilayah maritim.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk menganalisis kebijakan maritim Xi Jinping di Laut China Selatan. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat mengungkapkan pemahaman mendalam tentang strategi kebijakan maritim yang diterapkan oleh Xi Jinping, serta dampaknya terhadap dinamika geopolitik dan keamanan kawasan.

1. Tahap Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, yaitu:

1. Buku: Membahas kebijakan maritim, geopolitik, dan kepemimpinan strategis Tiongkok di Laut China Selatan.
2. Artikel Ilmiah: Mengkaji kebijakan luar negeri dan strategi maritim Tiongkok, termasuk analisis dampaknya terhadap hubungan internasional.
3. Laporan Kebijakan: Laporan pemerintah dan lembaga internasional yang berfokus pada hubungan internasional, keamanan regional, dan kebijakan maritim Tiongkok.

Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menemukan pola kebijakan maritim yang dijalankan oleh Xi Jinping. Data tersebut dianalisis dengan meninjau konteks historis, faktor politik, dan ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepemimpinan strategis yang dikembangkan oleh berbagai ahli kebijakan internasional, di mana penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana Xi Jinping mengelola diplomasi, kekuatan militer, dan inisiatif ekonomi. Tahapan analisis mencakup:

1. Identifikasi strategi kebijakan: Menelaah kebijakan militerisasi, pembangunan pulau buatan, dan diplomasi ekonomi seperti Belt and Road Initiative.
2. Penafsiran: Menerjemahkan tindakan Xi Jinping melalui kacamata teori kepemimpinan strategis, memahami bagaimana langkah-langkah tersebut diterapkan dalam konteks Laut China Selatan.
3. Evaluasi dampak: Mengukur bagaimana kebijakan ini mempengaruhi stabilitas regional, terutama bagi negara-negara ASEAN yang juga memiliki klaim di wilayah tersebut.

4. Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan keakuratan, data yang digunakan dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan tepercaya. Setiap temuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya untuk memastikan kesesuaiannya dalam konteks geopolitik dan kebijakan maritim.

5. Alasan Pemilihan Metode

Pendekatan ini dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti memahami kompleksitas kepemimpinan Xi Jinping dalam mengelola dinamika geopolitik yang berubah-ubah di Laut China Selatan. Analisis kualitatif deskriptif memberi fleksibilitas dalam mengeksplorasi hubungan antara kebijakan maritim dan dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Metode ini juga mengungkapkan konteks historis dan politik yang lebih dalam, membantu dalam memahami strategi yang diterapkan Tiongkok untuk memperkuat klaim teritorialnya serta dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap tatanan internasional.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan maritim yang ideal harus berfokus pada pengelolaan laut yang berkelanjutan, perlindungan kedaulatan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kebijakan ini tidak hanya menjamin keamanan maritim dan keberlanjutan sumber daya, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dan transportasi laut. Namun, saat ini banyak tantangan yang dihadapi, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, serta eksploitasi berlebihan yang mengancam ekosistem laut. Di wilayah-wilayah strategis seperti Laut China Selatan, konflik teritorial menambah kompleksitas menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, Xi Jinping, sebagai Presiden Tiongkok, memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh Tiongkok melalui kebijakan maritim yang tegas, termasuk di Laut China Selatan. Xi Jinping menggunakan pendekatan diplomasi, kekuatan militer, dan inisiatif global seperti Belt and Road Initiative untuk memperkuat dominasi Tiongkok dalam urusan maritim.

Strategi Kepemimpinan Xi Jinping dalam Mempromosikan Kebijakan Maritim Terkait Laut China Selatan

Xi Jinping memimpin Tiongkok dengan strategi kepemimpinan yang tegas dan proaktif dalam mempromosikan kebijakan maritim, terutama di Laut China Selatan. Xi melihat kawasan ini sebagai wilayah strategis yang penting, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Salah satu strategi utama yang diterapkan Xi adalah memperkuat militerisasi di wilayah tersebut. Menurut Lam (2015), Xi menginisiasi pembangunan pulau buatan yang dilengkapi dengan fasilitas militer, termasuk landasan udara dan pelabuhan, untuk mempertegas klaim teritorial Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini diambil sebagai

respons terhadap tekanan internasional dan klaim tumpang tindih dari negara-negara Asia Tenggara.

Selain pendekatan militer, Xi Jinping juga menggunakan diplomasi ekonomi untuk memajukan pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Inisiatif Belt and Road yang diperkenalkan Xi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur darat, tetapi juga memperluas jaringan maritim dengan negara-negara di Asia Tenggara (Shambaugh, 2020). Melalui kerja sama ekonomi bilateral, Tiongkok menciptakan ketergantungan ekonomi yang membantu memperkuat posisi negosiasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.

Lebih lanjut, Xi juga memanfaatkan hukum internasional secara selektif. Meskipun Tiongkok mengklaim mengikuti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), beberapa tindakan Tiongkok di wilayah ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS (Wang, 2021). Kepemimpinan Xi Jinping di Laut China Selatan mencerminkan strategi multifaset yang memadukan kekuatan militer, diplomasi ekonomi, dan penggunaan hukum internasional untuk memperkuat posisi geopolitik Tiongkok.

Diplomasi Maritim Xi Jinping dalam Mempromosikan Kebijakan Maritim Terkait Laut China Selatan

Xi Jinping menggunakan strategi diplomasi maritim yang terintegrasi untuk mempromosikan kebijakan Tiongkok di Laut China Selatan. Salah satu pendekatan utama adalah melalui diplomasi bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara. Melalui perjanjian ekonomi dan investasi dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), Xi Jinping memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga. Menurut Shambaugh (2020), kebijakan BRI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, tetapi juga untuk menciptakan ketergantungan ekonomi yang membuat negara-negara di kawasan lebih enggan untuk menentang klaim Tiongkok di Laut China Selatan.

Diplomasi ini juga mencakup upaya Tiongkok untuk membentuk narasi internasional yang mendukung klaimnya. Xi Jinping telah mengedepankan gagasan "win-win cooperation" dalam menyelesaikan sengketa maritim, mendorong negara-negara tetangga untuk bernegosiasi secara bilateral, daripada menginternasionalisasi konflik (Wang, 2021). Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi Tiongkok karena hubungan bilateral sering kali lebih mudah diatur dibandingkan dengan negosiasi multilateral yang melibatkan organisasi internasional seperti ASEAN.

Selain itu, Xi juga memanfaatkan forum-forum internasional untuk memperkuat pengaruh Tiongkok. Melalui diplomasi maritim di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN, Tiongkok berusaha mengedepankan dialog sambil terus memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Namun, upaya diplomasi ini seringkali dibarengi dengan tindakan keras, seperti patroli militer dan pembangunan infrastruktur maritim di wilayah yang disengketakan (Lam, 2015). Strategi diplomasi ganda ini menunjukkan bagaimana Xi Jinping menggabungkan kekuatan lunak dan keras untuk memastikan dominasi Tiongkok di Laut China Selatan.

Dengan memanfaatkan diplomasi ekonomi, dialog bilateral, dan pengaruh di forum internasional, Xi Jinping berhasil mempromosikan kebijakan maritim yang memperkuat posisi Tiongkok di kawasan tersebut.

Implikasi Militer dari Kebijakan Xi Jinping di Laut China Selatan

Kebijakan Xi Jinping di Laut China Selatan memiliki dampak militer yang signifikan, dengan Tiongkok secara aktif memperkuat kehadirannya di wilayah yang disengketakan melalui modernisasi angkatan laut dan pembangunan infrastruktur militer. Salah satu langkah paling menonjol adalah pembangunan pulau-pulau buatan di kawasan tersebut. Xi Jinping telah memerintahkan konstruksi pangkalan militer di pulau-pulau yang dibangun di Kepulauan Spratly dan Paracel, yang dilengkapi dengan landasan udara, radar, dan instalasi militer lainnya (Shambaugh, 2020). Kehadiran militer ini memperkuat kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan dan mengawasi aktivitas maritim di wilayah tersebut.

Modernisasi angkatan laut juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan Xi di Laut China Selatan. Tiongkok secara aktif memperluas armada lautnya, termasuk pembangunan kapal induk, kapal selam, dan kapal perang canggih. Menurut Lam (2015), modernisasi ini memungkinkan Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di perairan internasional dan melawan kehadiran militer Amerika Serikat serta negara-negara lain yang menentang klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Kehadiran militer yang semakin kuat ini memicu ketegangan regional dan global, terutama dengan negara-negara ASEAN yang juga mengklaim wilayah tersebut.

Selain meningkatkan kekuatan militer, kebijakan Xi juga menekankan penguatan milisi maritim dan penjaga pantai. Milisi maritim ini, meskipun tidak secara resmi menjadi bagian dari angkatan bersenjata, berperan penting dalam menegakkan klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Mereka sering terlibat dalam patroli dan pengusiran kapal asing yang dianggap melanggar perairan yang diklaim oleh Tiongkok (Wang, 2021).

Implikasi militer dari kebijakan Xi ini memperkuat dominasi Tiongkok di Laut China Selatan dan meningkatkan risiko konflik dengan negara-negara tetangga serta kekuatan global seperti Amerika Serikat. Dengan strategi militer yang komprehensif, Xi Jinping memastikan bahwa Tiongkok memiliki keunggulan strategis di wilayah maritim yang penting ini.

Relevansi Lesson Learned untuk Kepemimpinan di Wilayah Maritim Lain

Pengalaman kepemimpinan Xi Jinping dalam mempromosikan kebijakan maritim di Laut China Selatan menawarkan banyak pelajaran berharga bagi pemimpin di wilayah maritim lainnya. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer. Xi berhasil menggunakan kombinasi diplomasi ekonomi, seperti Belt and Road Initiative (BRI), serta modernisasi angkatan laut dan militerisasi pulau-pulau buatan, untuk memperkuat posisi Tiongkok di Laut China Selatan (Shambaugh, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana penggunaan "kekuatan keras" dan "kekuatan lunak" dapat berjalan berdampingan untuk mencapai kepentingan strategis.

Kepemimpinan Xi juga mengajarkan pentingnya memiliki visi jangka panjang yang jelas. Dalam konteks Laut China Selatan, Xi Jinping secara konsisten menegaskan pentingnya wilayah tersebut bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dengan visi jangka panjang yang kuat, Xi berhasil membangun infrastruktur militer dan jaringan ekonomi yang memperkuat posisi Tiongkok secara regional (Lam, 2015). Pemimpin di wilayah maritim lainnya dapat belajar dari pendekatan ini dengan merancang strategi yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan menjaga kepentingan nasional mereka.

Pelajaran lain yang relevan adalah kemampuan mengelola risiko konflik. Xi menggunakan pendekatan diplomasi bilateral dengan negara-negara ASEAN, berusaha mengurangi ketegangan melalui dialog, meskipun tetap mempertahankan klaim Tiongkok (Wang, 2021). Pemimpin maritim lain bisa mengambil inspirasi dari strategi ini dalam mengelola konflik teritorial, berusaha mencari solusi damai tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

PEMBAHASAN

Strategi Kepemimpinan Xi Jinping dan Kontribusinya terhadap Kebijakan Maritim Terkait Laut China Selatan

Xi Jinping telah menunjukkan strategi kepemimpinan yang kuat dan konsisten dalam memperkuat kebijakan maritim Tiongkok di Laut China Selatan. Salah satu strategi utamanya adalah memadukan kekuatan militer dan diplomasi ekonomi untuk memperluas pengaruh Tiongkok. Xi memperkuat militerisasi wilayah Laut China Selatan dengan membangun infrastruktur di pulau-pulau buatan dan memperkuat kehadiran angkatan laut di kawasan tersebut. Menurut Shambaugh (2020), pembangunan fasilitas militer di Kepulauan Spratly dan Paracel merupakan langkah penting yang memperkuat klaim teritorial Tiongkok dan memproyeksikan kekuatan di wilayah yang dianggap strategis.

Selain itu, Xi juga memanfaatkan diplomasi ekonomi melalui ****Belt and Road Initiative (BRI)****, yang memperluas hubungan ekonomi dan infrastruktur dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Diplomasi ini tidak hanya meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara tersebut pada Tiongkok, tetapi juga mengurangi resistensi terhadap kebijakan maritim Tiongkok (Wang, 2021). Dengan demikian, Xi berhasil membentuk lingkungan geopolitik yang lebih kondusif bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Laut China Selatan.

Xi juga menekankan pentingnya penggunaan diplomasi bilateral, alih-alih menginternasionalisasi sengketa, yang memberikan Tiongkok keunggulan dalam mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga. Lam (2015) menyebutkan bahwa melalui negosiasi langsung dengan negara-negara ASEAN, Xi dapat meminimalisir potensi intervensi dari pihak ketiga seperti Amerika Serikat, sekaligus mempertahankan klaim Tiongkok.

Kontribusi strategis Xi terhadap kebijakan maritim mencakup perpaduan diplomasi dan kekuatan militer, serta penekanan pada visi jangka panjang yang

mengarahkan Tiongkok untuk mengamankan posisi dominannya di Laut China Selatan.

Diplomasi Maritim Xi Jinping dalam Mempromosikan Kebijakan Maritim Terkait Laut China Selatan

Xi Jinping telah menerapkan diplomasi maritim yang kompleks dan strategis untuk mempromosikan kebijakan maritim Tiongkok di Laut China Selatan. Pendekatan diplomasi ini mencakup penggunaan berbagai alat untuk memperkuat klaim teritorial dan meningkatkan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Salah satu strategi utama Xi adalah memanfaatkan ****Belt and Road Initiative (BRI)****, yang bertujuan memperluas jaringan ekonomi dan infrastruktur maritim Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara (Shambaugh, 2020). Inisiatif ini tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik yang mendukung klaim maritimnya.

Selain diplomasi ekonomi, Xi juga menerapkan diplomasi bilateral untuk mengelola sengketa dan meminimalkan ketegangan dengan negara-negara tetangga. Melalui perjanjian dan kerjasama langsung, Tiongkok berusaha untuk meredakan konflik teritorial sambil mempertahankan kepentingan strategisnya di Laut China Selatan (Wang, 2021). Diplomasi ini sering disertai dengan upaya untuk memperkuat posisi Tiongkok di forum internasional dan regional, seperti ASEAN, dengan mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai alat untuk mengatasi perselisihan.

Xi juga menggunakan strategi "kekuatan lunak" dalam bentuk bantuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara kecil di kawasan tersebut. Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan Tiongkok dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi dominasi Tiongkok di Laut China Selatan (Lam, 2015). Dengan demikian, diplomasi maritim Xi Jinping menunjukkan bagaimana kombinasi diplomasi ekonomi, bilateral, dan internasional dapat digunakan untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam kebijakan maritimnya.

Implikasi Militer dari Kebijakan Xi Jinping di Laut China Selatan

Kebijakan Xi Jinping di Laut China Selatan memiliki implikasi militer yang luas dan mendalam, memperkuat posisi Tiongkok dengan cara yang signifikan. Salah satu langkah paling signifikan adalah pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau buatan, yang meliputi landasan udara, radar, dan fasilitas pelabuhan. Menurut Shambaugh (2020), proyek-proyek ini meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk melancarkan operasi militer dan memperluas pengaruhnya di wilayah strategis ini. Kehadiran militer yang semakin kuat memperkuat klaim teritorial Tiongkok dan meningkatkan kekuatan proyeksi militer di perairan internasional.

Modernisasi angkatan laut Tiongkok juga menjadi bagian integral dari kebijakan Xi. Tiongkok telah memperluas armada lautnya, termasuk kapal induk dan kapal selam, serta memperkuat kemampuannya untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan dan memperkuat pengawasan di Laut China Selatan (Lam, 2015). Modernisasi ini tidak hanya menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk

menghadapi ancaman, tetapi juga menambah ketegangan dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global seperti Amerika Serikat.

Selain itu, Xi Jinping juga memanfaatkan milisi maritim dan penjaga pantai untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang disengketakan. Ini berfungsi untuk menegakkan klaim Tiongkok tanpa melibatkan angkatan bersenjata secara langsung, yang sering kali memicu ketegangan regional (Wang, 2021). Tindakan ini menunjukkan penggunaan strategi militer tidak langsung untuk memperkuat posisi Tiongkok sambil menghindari konflik terbuka.

Implikasi militer dari kebijakan Xi Jinping menciptakan ketegangan di kawasan maritim dan meningkatkan risiko konflik dengan negara-negara yang memiliki klaim bersaing, serta dengan kekuatan internasional yang terlibat dalam pengamanan jalur perdagangan global.

Relevansi Lesson Learned untuk Kepemimpinan di Wilayah Maritim Lain

Pengalaman kepemimpinan Xi Jinping dalam kebijakan maritim di Laut China Selatan menawarkan pelajaran berharga bagi pemimpin di wilayah maritim lainnya. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi ekonomi. Xi Jinping berhasil mengintegrasikan kekuatan militer dengan diplomasi ekonomi melalui ****Belt and Road Initiative (BRI)**** untuk memperkuat posisi Tiongkok di Laut China Selatan (Shambaugh, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pemimpin dapat menggunakan berbagai alat untuk memperluas pengaruh dan memperkuat klaim teritorial, menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendukung kepentingan strategis.

Selain itu, Xi juga menunjukkan pentingnya memiliki visi jangka panjang yang konsisten. Dalam konteks Laut China Selatan, Xi menetapkan strategi yang jelas untuk membangun infrastruktur militer, memperkuat klaim teritorial, dan meningkatkan hubungan diplomatik (Lam, 2015). Visi ini memberikan arah yang stabil dan memungkinkan implementasi kebijakan yang koheren, suatu hal yang dapat diadopsi oleh pemimpin di wilayah maritim lain dalam merumuskan strategi mereka.

Pelajaran lain yang relevan adalah manajemen konflik. Xi menggunakan diplomasi bilateral untuk mengelola sengketa dengan negara-negara tetangga, menghindari konflik terbuka dan mengurangi ketegangan regional (Wang, 2021). Strategi ini bisa diterapkan oleh pemimpin di wilayah lain dengan sengketa maritim untuk mengelola ketegangan dan mencari solusi damai sambil menjaga kepentingan nasional mereka.

Dengan mengadopsi pelajaran dari kebijakan Xi, pemimpin di wilayah maritim lainnya dapat meningkatkan efektivitas strategi mereka dalam menghadapi tantangan geopolitik dan memperkuat posisi mereka dalam arena internasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Strategi kepemimpinan Xi Jinping di Laut China Selatan menunjukkan kombinasi efektif antara kekuatan militer dan diplomasi ekonomi. Xi menggunakan modernisasi militer dan pembangunan infrastruktur untuk

memperkuat klaim teritorial, sementara diplomasi bilateral dan ekonomi melalui Belt and Road Initiative (BRI) memperluas pengaruh Tiongkok. Implikasi militer dari kebijakan ini menciptakan ketegangan regional dan meningkatkan risiko konflik. Pelajaran dari strategi Xi, termasuk pentingnya visi jangka panjang dan pengelolaan konflik melalui diplomasi, menawarkan panduan berharga bagi pemimpin di wilayah maritim lainnya untuk mengelola tantangan geopolitik dan memperkuat posisi strategis mereka.

Rekomendasi

Pemimpin di wilayah maritim lain dapat belajar dari strategi Xi Jinping dengan mengintegrasikan kekuatan militer dan diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi strategis mereka. Penting untuk mengembangkan visi jangka panjang yang jelas dan konsisten serta memanfaatkan diplomasi bilateral untuk mengelola sengketa. Selain itu, pendekatan yang memadukan kekuatan lunak dan keras bisa meningkatkan efektivitas kebijakan maritim dan mengurangi risiko konflik. Memahami dan mengadaptasi pelajaran dari pengalaman Xi dapat membantu pemimpin lain dalam menghadapi tantangan geopolitik dan memperkuat kepemimpinan mereka di arena maritim global.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan tentang kepemimpinan Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok menyoroti peningkatan agresivitas kebijakan maritimnya, terutama di Laut Cina Selatan. Di bawah Xi, Tiongkok semakin menegaskan klaim teritorialnya melalui pembangunan pulau buatan, penguatan militer, dan patroli maritim yang intensif. Kebijakan ini mencerminkan ambisi strategis Xi untuk memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan maritim global. Penelitian ini juga mengamati respons internasional terhadap tindakan Tiongkok, termasuk ketegangan dengan negara-negara ASEAN dan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan tatanan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para dosen di Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI atas bimbingan dan dukungannya dalam menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga, baik melalui diskusi, penyediaan data, maupun masukan yang konstruktif, yang telah memperkaya analisis kami. Tanpa bantuan dan dukungan Anda, artikel ini tidak akan terwujud. Kami sangat menghargai dedikasi dan komitmen Anda dalam memajukan studi keamanan maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Jones, M. (2020). Maritime Cooperation and Stability in International Waters: A Multilateral Approach. *International Journal of Maritime Studies*, 45(3), 210-225.

Lam, W. (2015). *Chinese Politics in the Era of Xi Jinping*. Routledge.

Roberts, C. M. (2019). *The Ocean of Life: The Fate of Man and the Sea*. Penguin Books.

Shambaugh, D. (2020). *China's Leaders: From Mao to Now*. Polity Press.

Smith, J. (2021). *Maritime Policy and Economic Growth: Ensuring Security and Sustainability*. Oceanic Press.

Wang, X. (2021). *Diplomacy and Maritime Security in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.